

SEKTOR UNGGULAN, KETIMPANGAN DAN KELAYAKAN PEMEKARAN KAPUAS RAYA DARI KALIMANTAN BARAT

LEADING SECTOR AND FEASIBILITY OF EXPANDING KAPUAS RAYA FROM WEST KALIMANTAN

Firman ^{1,a*)},

¹FEBI IAIN Pontianak

e-mail: ^{a)}firman@iainptk.ac.id

Diterima: 31 Juli 2023, Revisi: 29 Desember 2023, Diterbitkan: 31 Desember 2023

ABSTRACT

This study was conducted to examine leading sectors, inequality and the feasibility of expanding Kapuas Raya from West Kalimantan, using the Klassen Typology Analysis, Location Question (LQ) and Williamson Index methods. The research results show that Melawi Regency has five superior sectors, Sekadau Regency has five superior sectors, Kapuas Hulu has only one superior sector. Five sectors are included in the leading sector category in Sintang Regency, only Sanggau Regency does not have a leading sector. The LQ test shows that Sanggau Regency only has four basic sectors, Melawi ten basic sectors, Sekadau Regency seven basic sectors, Kapuas Hulu Regency has eight basic sectors and Sintang Regency eight basic sectors. The Williamson Index results show that five regions have low scores, namely 0.064 in 2015 and 0.070 in 2020, the lowest is Sintang Regency at 0.00140 followed by Sekadau at 0.00613. The results of the Feasibility Test for Expansion, West Kalimantan and five other regions are in the category of regions that are not suitable for expansion based on three indicators, namely the Regional Financial Index, Economic Growth and Human Development Index.

Keywords: Economic Development Inequaity, GRDP, Klassen Typology, Location Quotient (LQ)

ABSTRAK

Kajian ini dilakukan untuk mengkaji sektor unggulan, ketimpangan, dan kelayakan pemekaran Kapuas Raya dari Kalimantan Barat dengan metode Analisis Tipologi Klassen, *Location Quetiont* (LQ) dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Melawi memiliki lima sektor unggulan, Kabupaten Sekadau memiliki lima sektor unggulan, Kapuas Hulu hanya satu sektor unggulan. Lima sektor termasuk dalam kategori sektor unggulan di Kabupaten Sintang hanya Kabupaten Sanggau yang tidak memiliki sektor unggulan. Uji LQ menunjukkan Kabupaten Sanggau hanya empat sektor basis, Melawi sepuluh sektor basis, Kabupaten Sekadau tujuh sektor basis, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sektor basis, dan Kabupaten Sintang delapan sektor basis. Hasil Indeks Williamson menunjukkan bahwa lima daerah memiliki skor yang rendah yaitu rata-rata sebesar 0,064 pada tahun 2015 dan 0,070 pada tahun 2020, terendah adalah Kabupaten Sintang sebesar 0,00140 diikuti Sekadau sebesar 0,00613. Hasil uji kelayakan pemekaran, Kalimantan Barat dan lima daerah lainnya kategori daerah tidak layak untuk dimekarkan dilihat dari tiga indikator, yakni indeks keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kata kunci: Sektor Unggulan Ekonomi, Ketimpangan, PDRB, Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ)

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan empat belas kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar dari provinsi di Pulau Kalimantan, dimana pada tahun 2014 jumlah penduduk Kalimantan Barat sebesar 4.716.093 jiwa dan meningkat sebesar 14,8% pada tahun 2020 atau sebesar 5.414.390 jiwa.

Dalam penelitian Suratman et al., (2012), dikatakan bahwa desain penataan daerah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2012 – 2025 bahwa isu terhadap pemekaran di Kalimantan Barat selama ini sudah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat sehingga pemerintah Kalimantan Barat merespon keinginan tersebut dengan membuat *grand design* kabupaten/kota yang layak pada tahun 2025. Jika tanpa pengendalian yang baik, pemekaran Kalimantan Barat yang menjadi perbincangan tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap roda pemerintahan yang baru, karena pemerintahan yang baru dalam melakukan pelayanan publik dan kondisi anggaran atau keuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) pasti bertumpu pada penerimaan anggaran dan pendapatan belanja daerah lama yang mengandalkan dari dana pemerintah dan transfer, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika provinsi baru tersebut disetujui oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kalimantan Barat sudah mengantisipasi lima kabupaten dipersiapkan untuk dimekarkan, di antaranya adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang.

Jika dilihat dari pendapatan masyarakat Indonesia sebagian besar bergantung terhadap sektor pertanian sehingga sektor pertanian ini merupakan sangat penting (Fortunika et al., 2017). Begitu juga Provinsi Kalimantan Barat, sektor yang memiliki kontribusi terbesar, serta sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian. Jika tujuan dari pembangunan nasional adalah kesejahteraan masyarakat, tidak lain dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup dari sektor pertanian (Arsyad, 2016).

Sumber daya pembangunan yang potensial menjadikan sektor yang paling strategis dalam perencanaan pembangunan, baik saat ini maupun ke depan, baik tingkat nasional ataupun di daerah adalah sektor pertanian (Fortunika et al., 2017). Sektor pertanian memiliki peran yang cukup tinggi dan strategis terhadap perekonomian Indonesia (PKA DPR RI, 2021; Khoyanah et al., 2015). Walaupun ada beberapa daerah masih mengembangkan pendapatannya dari sektor industri, tetapi sampai hari ini beberapa daerah di Indonesia yang menekankan pendapatannya dari sektor industri belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan sektor yang paling tinggi dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian.

Lima kabupaten yang diajukan menjadi bagian dari provinsi baru, yakni yakni adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Ketapang dari kelima kabupaten tersebut, sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana pada tahun

2019 kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Melawi merupakan sektor yang paling besar sumbangsinya terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama produksi sawit, yakni memproduksi sebesar 186.342 ton dan produksi terbanyak kedua adalah karet yakni sebesar 15.152 ton, begitu juga Kabupaten Sanggau rata-rata kontribusi terbesar penyumbang terhadap pendapatan daerah pada tahun 2015-2020 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni sebesar 35% dan merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar yakni sebesar 163.312 pekerja pada tahun 2020. Kabupaten Sekadau 67,4% masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, kehutanan, pemburuan dan perikanan. Lapangan usaha di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, yakni sebesar 74.150 pekerja atau sebesar 52,68%, sektor industri pengolahan dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 28.272 pekerja dan sektor jasa yakni sebesar 38.331 pekerja. Pada tahun 2020 penduduk Sintang yang bekerja adalah sebesar 222.933 jiwa, paling banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2020 adalah sektor pertanian, perkebunan, perburuan dan perikanan yakni sebesar 142.977 pekerja dan perdagangan, rumah makan, dan akomodasi yakni sebesar 26.625 pekerja tetapi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat yang paling kecil pada tahun 2020 adalah sektor listrik, gas, dan air minum, yakni sebesar 302 pekerja dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar 2.987 pekerja.

Oleh sebab latar belakang yang sudah dipaparkan pada pendahuluan di atas, peneliti ingin mengetahui sektor unggulan dan kelayakan pemekaran lima kabupaten pada tahun 2015-2020 yang dipersiapkan menjadi bagian provinsi baru dengan nama Kapuas Raya, yakni di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan lokasi penelitian di lima kabupaten di Kalimantan Barat yang diusulkan menjadi bagian provinsi baru Kapuas Raya, yakni Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi serta Provinsi Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Harga Konstan (ADHK), dan jumlah penduduk di lima kabupaten dan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2015-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis yang digunakan untuk mengetahui struktur pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten tersebut digunakan analisis Tipologi Klassen, dimana kriteria yang digunakan terdiri dari empat kategori (Ismail, 2020), yakni :

Tabel 1. Matrik Klasifikasi Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan (Growth Rate) (R)	PDRB Per Kapita	
	Yi > Y	Yi < Y
Ri > R	Sektor Maju dan Cepat Tumbuh / Sektor Prima (<i>Advanced and fast growth regions</i>)	Sektor Berkembang Cepat / Sektor Potensial (<i>rapidly growing regions</i>)
Ri < R	Sektor Berkembang (<i>Developed regions but depressed</i>)	Sektor Tertinggal / Terbelakang (<i>Disadvantaged regions</i>)

Kuadran I (pertama) atau juga disebut sebagai sektor yang cepat maju dan cepat tumbuh atau pertumbuhan tinggi (*high income and high growth*), dikategorikan sektor ini jika nilai dari pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita daerah lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat. Kuadran II (kedua) adalah sektor yang cepat maju akan tetapi tertekan (*high income but low growth*), artinya sektor ini nilai PDRB perkapita daerah lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Barat, tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.

Kuadran III (ketiga) adalah sektor dengan kategori berkembang cepat (*high growth but low income*), yang masuk ketegori sektor berkembang adalah jika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Barat, tetapi nilai PDRB perkapita daerah lebih kecil atau rendah daripada Provinsi Kalimantan Barat. Kudran IV (keempat) adalah sektor dengan kategori tertinggal (*low growth and low income*), yang artinya masuk kategori tertinggal jika pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi dan PDRB Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis *Locaton Quetient* (LQ) merupakan analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sektor - sektor ekonomi dalam PDRB yang diketegorkan sebagai sektor

potensial atau sektor basis dan sektor tidak potensial atau sektor *non* basis. Selain itu juga metode ini dilakukan keuntungan komparatif suatu sektor, sub sektor atau komoditi (Sjafriza, 2018). Formulasi koefisien lokasi (LQ) sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{(y_{ij})}{(\sum_i y_{ij})} : (\sum_i y_{ij}) / \sum_i \sum_j y_{ij} \dots (1)$$

Yij = Nilai Tambah
i = di wilayah j

Arti dari hasil perhitungan koefisien lokasi (LQ) sebagai berikut:

- a. LQ > 1, artinya bahwa sektor atau subsektor memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang lebih besar secara relatif dibandingkan dengan sektor atau subsektor yang sama di daerah lainnya, atau sektor pada kabupaten lebih besar dari pada sektor yang sama pada Provinsi Kalimantan Barat, serta sektor ini merupakan sektor basis atau sektor potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi kabupaten tersebut.
- b. LQ < 1, maka sektor atau subsektor tersebut dikatakan tidak memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang lebih kecil secara relatif dibandingkan dengan sektor atau subsektor yang sama di daerah lainnya, atau sektor pada kabupaten lebih kecil daripada sektor yang sama pada Provinsi Kalimantan Barat, serta sektor ini merupakan sektor *non* basis atau

sektor tidak potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi kabupaten tersebut.

Indeks Williamson, atau indeks ketimpangan merupakan alat analisis yang sering digunakan untuk melihat ketimpangan sebuah daerah. Adapun rumus Indeks Williamson adalah:

$$IW = \sqrt{\sum \frac{(Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}} \dots\dots\dots (2)$$

Y_i = PDRB perkapita kabupaten i

Y = PDRB perkapita rata-rata Kalbar

f_i = Penduduk kabupaten

n = Penduduk Kalbar

Faktor kelayakan pemekaran menggunakan tiga variabel indikator, indikator ini adalah pertumbuhan ekonomi, kemampuan keuangan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk melihat indikator kelayakan pemekaran digunakan bobot dan skor seperti di bawah ini (Sjafrizal, 2018):

Tabel 2. Indikator Kelayakan Pemekaran Daerah

No.	Expansion Eligibility Faktor	Bobot
1	Regiona Financia Capacity	40
2	Economic Growth	30
3	Human Development Index (HDI)	30

Sumber : (Sjafrizal, 2018)

Skor merupakan indikator yang dijadikan salah satu dasar untuk melihat kelayakan pemekaran suatu daerah, dimana jika skornya semakin tinggi maka potensi pemekaran lebih besar. Dalam penentuan skor ini, yakni dengan memperbandingkan nilai antara kabupaten dan kabupaten, kota dengan kota serta provinsi dengan

provinsi. Pemberian skor 3 jika nilai indikatornya lebih besar atau sama dengan 66%, skor 2 jika nilainya atau rata-ratanya > 33% dan skor 1 jika nilai atau rata-ratanya < 33% (Marta, 2012). Untuk memberi nilai total dari hasil skor dan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Sebagai Indikator Pemberian Bobot dan Skor Kelayakan Pemekaran

No	Variabel	Satuan	Nilai	Bobot	Skor
1	IPM	Indeks	<0,5	40	3
		Indeks	0,5-1,0	40	2
		Indeks	>1,0	40	1
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	<3,00	30	3
		%	3,00 – 5,00	30	2
		%	>5,00	30	1
3	Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks	<65,00	30	3
		Indeks	65,00 – 70,00	30	2
		Indeks	>70,00	30	1

Sumber: (Marta, 2012)

Sedangkan untuk indikator kelayakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Indikator Kelayakan Pemekaran

No	Kelayakan	Skor Indikator	Keterangan
1	Sangat Layak	300	Rekomendasi
2	Layak	250 – 299	Rekomendasi
3	Tidak Layak	< 249	Ditolak

Sumber: (Peraturan Pemerintah RI, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Unggulan

Lima daerah dikelompokkan sesuai dengan kuadran, analisis tipologi klassen ini merupakan salah satu analisis dalam membandingkan antara laju pertumbuhan ekonomi lima

kabupaten yang akan diusulkan menjadi bagian provinsi baru, perbandingan antara kontribusi lima kabupaten dengan kontribusi Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 5. Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Sanggau

No	Kontribusi Laju Pertumbuhan	Kontribusi Kabupaten Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi (yik > yi)	Kontribusi Kabupaten Lebih Kecil dari pada Kontribusi Provinsi (yik < yi)
1	Pertumbuhan Ekonomi di atas Rata-rata	Sub Sektor Prima	Sub Sektor Potensial Pengadaan Listrik, Gas Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Transportasi dan Pergudangan Jasa Perusahaan
2	Pertumbuhan Ekonomi di bawah Rata-rata	Sub Sektor Berkembang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan <i>Real Estate</i> Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Sub Sektor Terbelakang Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran dan Reperasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

Sumber : Data Olahan, 2023

Dari hasil uji tipologi klassen di atas menjelaskan bahwa sektor yang berada di kuadran I atau sektor prima adalah tidak ada, sedangkan sektor yang berada di kuadran II atau sektor yang potensial ada lima, yakni sektor pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan serta sektor jasa perusahaan. Sektor potensial ini adalah sektor pertumbuhan PDRB Kabupaten Sanggau lebih besar dari pada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan kontribusi PDRB persektor Kabupaten Sanggau lebih kecil dari pada kontribusi PDRB persektor Kalimantan Barat atau yang disebut dengan besar kecil.

Sektor yang berada di kuadran III adalah sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, *real estate*, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sektor ini merupakan saktor yang sedang berkembang, yakni pertumbuhan rendah tetapi kontribusinya tinggi terhadap PDRB.

Sedangkan untuk sektor yang berada di kuadran IV atau sektor yang terbelakang yakni sektor yang pertumbuhan rendah dan kontribusi juga rendah, yakni sektor pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, pengadaan air, reparasi mobil dan motor, perdagangan besar dan eceran, jasa kesehatan, jasa pendidikan, kegiatan social serta jasa lainnya.

Tabel 6. Hasil Indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten Sanggau

No	Lapangan Usaha	LQ						Rata-rata	Keterangan (> 1) = Potensial
		2020	2019	2018	2017	2016	2015		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.52	Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.46	Potensial
3	Industri Pengolahan	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.10	Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.29	Tidak Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.23	Tidak Potensial
6	Konstruksi	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.56	Tidak Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.77	Tidak Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.36	Tidak Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.75	Tidak Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.94	Tidak Potensial
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.54	Tidak Potensial
12	Real Estate	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.93	Tidak Potensial
13	Jasa Perusahaan	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.59	Tidak Potensial
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.00	Potensial
15	Jasa Pendidikan	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.69	Tidak Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.85	Tidak Potensial
17	Jasa Lainnya	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.59	Tidak Potensial

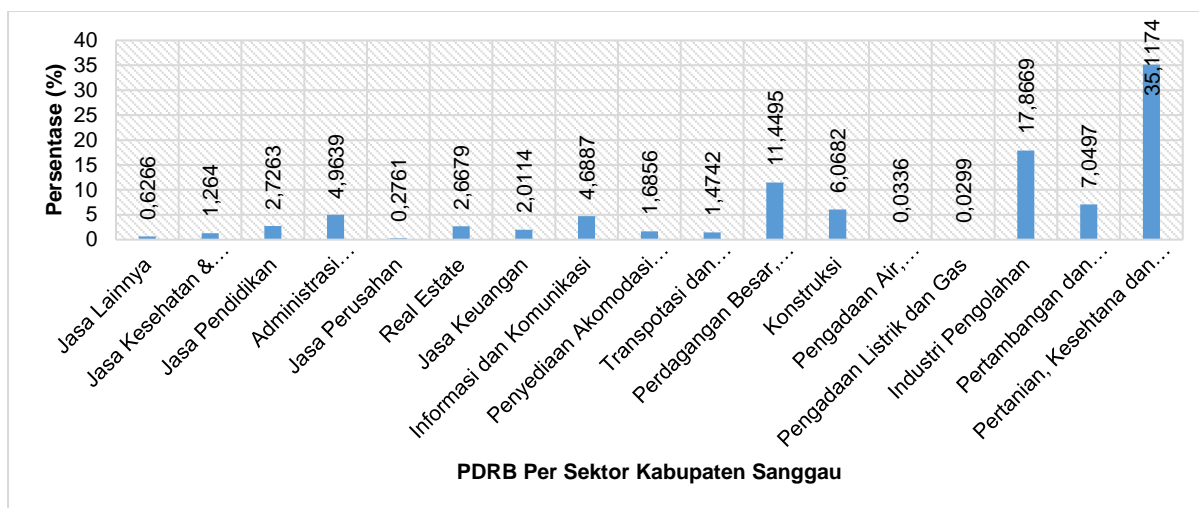
Sumber: Data olahan, 2021

Empat sektor pada tabel di atas merupakan sektor basis atau sektor potensial di Kabupaten Sanggau, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penggalian dan pertambangan, industri pengelolaan dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan serta jaminan sosial wajib, sedangkan sisanya merupakan sektor *non* basis atau sektor yang tidak potensial di Kabupaten Sanggau.

Jika dilihat dari sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sanggau, tahun 2015-2020 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni rata-rata kontribusinya sebesar 35,12%, industri pengolahan sebesar 17,87% dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,45%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020 Kabupaten Sanggau

cukup besar yakni 70,38% sebagian besar bekerja di sektor pertanian yakni sebesar 163.312 jiwa, terbesar kedua sektor yang menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yakni sebesar 20.210 jiwa. Sebesar 241.987 jiwa penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah bekerja sebagian besar berpendidikan \leq Sekolah Dasar (SD)/ \leq *Primary School*, yakni sebanyak 132.435 jiwa, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 49.993 jiwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 43.045 jiwa dan perguruan tinggi sebesar 16.514 jiwa, dengan jumlah penyerapan tenaga kerja di 16 sektor adalah sebesar 241.987 jiwa. Produksi tanaman sayuran semusim menurut jenis tanaman terbesar adalah cabai, yakni sebesar 517 ton pada tahun 2020, dan cabe rawit, yakni sebesar 360 ton.



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 1. Rata-rata Kontribusi Persektor Terhadap PDRB Kabupaten Sanggau Tahun 2015-2020

Pada gambar di atas, kontribusi tertinggi pada tahun 2015–2020 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni sebesar 35,1%, disusul oleh sektor industri pengolahan yakni sebesar 17,8% dan terendah adalah pengadaan gas dan listrik yakni sebesar 0,0299 dan sektor, pengelolaan sampah, limbah dan duar ulang dan pengadaan air 0,0336. Sektor yang berada di kuadran I (sektor prima) untuk Kabupaten

Melawi, adalah sektor *real estate*, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa pendidikan. Artinya bahwa sektor yang ada pada sektor prima adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Melawi lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Barat dan juga disebut sektor yang maju dan cepat tumbuh.

Tabel 7. Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Melawi

No	Kontribusi	Kontribusi Kabupaten Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi ($y_{ik} > y_i$)	Kontribusi Kabupaten Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi ($y_{ik} < y_i$)
	Laju Pertumbuhan		
1	Pertumbuhan Ekonomi di atas rata-rata	Sub Sektor Prima Konstruksi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Real Estate</i> Jasa Pendidikan Jasa Lainnya	Sub Sektor Potensial Industri Pengolahan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Transportasi dan Pergudangan
2	Pertumbuhan Ekonomi di bawah rata-rata	Sub Sektor Berkembang Pertambangan dan Penggalan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Informasi dan Komunikasi Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sub Sektor Terbelakang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pengadaan Listrik dan Gas Jasa Keuangan Jasa Perusahaan

Sumber: Data Olahan, 2021

Sedangkan sektor yang berada di kuadran II (sektor potensial) ada tiga sektor, artinya sektor ini adalah sektor dengan rata-rata PDRB per kapita

kabupaten lebih tinggi daripada rata-rata PDRB per kapita Kalimantan Barat, selain itu juga tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten

rendah dari pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Sedangkan sektor yang berada pada kuadran III (sektor berkembang) yakni sebesar empat atau sektor dengan rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten lebih kecil daripada PDRB Kalimantan Barat, tetapi pertumbuhan ekonomi per kapita lebih rendah

daripada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan sektor yang berada pada kuadran IV atau sektor terbelakang, sebesar empat sektor, artinya sektor ini merupakan sektor dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kabupaten Melawi lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi dan PDRB Provinsi Kalimantan Barat.

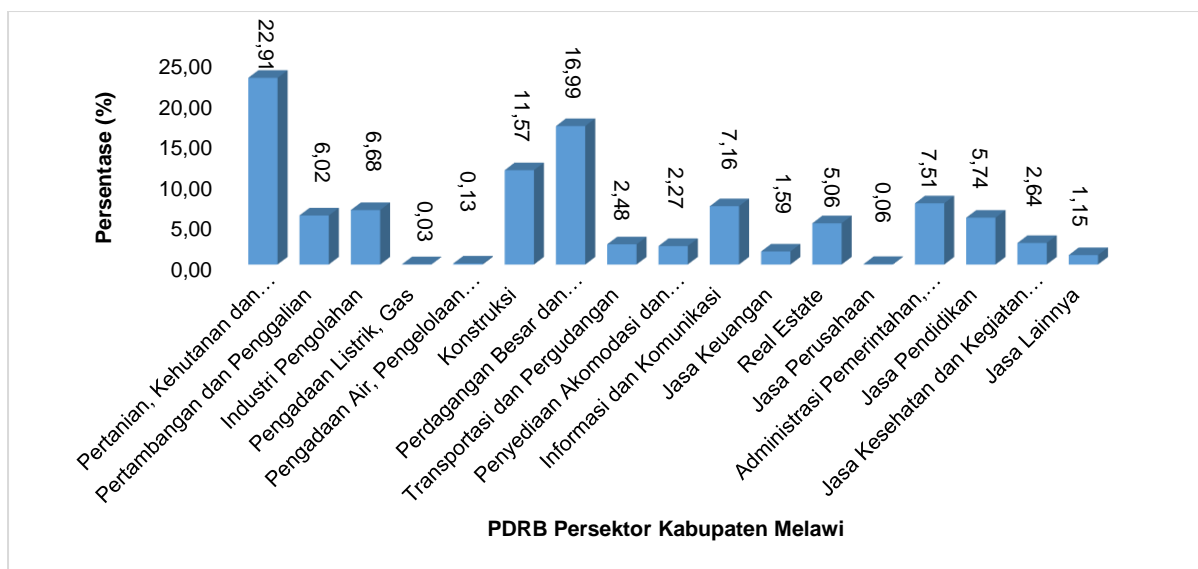
Tabel 8. Hasil Indeks Location Question (LQ) Kabupaten Melawi

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ (Tahun)						> 1 = Potensial < 1 Tidak Potensial
		2020	2019	2018	2017	2015	Rata-rata	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.972	0.966	0.975	0.997	1.019	1.027	Tidak Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	0.975	1.172	1.228	1.323	1.315	1.549	Potensial
3	Industri Pengolahan	0.416	0.419	0.423	0.418	0.404	0.396	Tidak Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.300	0.313	0.315	0.322	0.319	0.321	Tidak Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.912	0.903	0.905	0.880	0.873	0.861	Tidak Potensial
6	Konstruksi	1.128	1.145	1.104	1.028	1.010	1.083	Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.164	1.146	1.146	1.153	1.152	1.143	Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	0.683	0.592	0.578	0.583	0.589	0.589	Tidak Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.106	0.980	0.994	1.004	0.992	0.990	Tidak Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1.433	1.443	1.421	1.378	1.453	1.459	Potensial
11	Jasa Keuangan	0.422	0.436	0.412	0.420	0.423	0.433	Tidak Potensial
12	Real Estate	1.770	1.777	1.780	1.797	1.776	1.738	Potensial
13	Jasa Perusahaan	0.119	0.121	0.122	0.122	0.121	0.121	Tidak Potensial
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.507	1.510	1.514	1.522	1.519	1.529	Potensial
15	Jasa Pendidikan	1.474	1.453	1.466	1.467	1.435	1.386	Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.577	1.815	1.806	1.821	1.818	1.801	Potensial
17	Jasa Lainnya	1.108	1.067	1.084	1.098	1.113	1.105	Potensial

Sumber: Data Olahan, 2021

Sepuluh sektor Kabupaten Melawi yang potensial, di antaranya adalah sektor informasi dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor administrasi pemerintahan, sektor *real estate*,

sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial wajib, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor lainnya, sedangkan sektor lainnya merupakan sektor yang tidak potensial.



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 2. Rata-rata Kontribusi Persektor Terhadap PDRB Kabupaten Melawi Tahun 2015 - 2020

Kontribusi terbesar pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Melawi terhadap PDRB, adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni sebesar 22,91% dan disusul oleh sektor perdagangan besar dan kecil dan reparasi mobil dan sepeda motor, yakni sebesar 16,99%.

Angkatan kerja pada tahun 2020 Kabupaten Melawi adalah sebesar 115.559 jiwa, dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 3.118 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Melawi memiliki pendidikan terbesar adalah ≤ Sekolah Dasar (SD) atau sebanyak 58.124 pekerja, sedangkan pekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20.321 pekerja dan pekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) adalah sebanyak 33.996 pekerja. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Melawi, dimana pada tahun 2020 persentase penduduk Kabupaten Melawi adalah sebesar 12,04% atau sebesar 25,34 ribu jiwa. Sedangkan produksi terbesar di Kabupaten Melawi adalah produksi kelapa sawit yakni sebesar 186.342 ton, hasil produksi terbesar berada di Kecamatan Belimbing yakni sebesar 15.800 ton pada tahun 2019 dan produksi karet pada tahun tersebut adalah 15.152 ton, terbesar dalam memproduksi atau menghasilkan karet berada di Kecamatan Nanga Pinoh yakni 2.857 ton pada tahun 2019.

Tabel 9. Hasil Tipologi Kelas Kabupaten Sekadau

No	Kontribusi Laju Pertumbuhan	Kontribusi Kabupaten Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi (yik > yi)	Kontribusi Kabupaten Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi (yik < yi)
1	Pertumbuhan Ekonomi di atas rata-rata	Sub Sektor Prima Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Konstruksi Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minum <i>Real Estate</i> Administrasi Pemerintahan,	Sub Sektor Potensial Industri Pengolahan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

		Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Transportasi dan Pergudangan Jasa Keuangan Jasa Pendidikan
2	Pertumbuhan Ekonomi di bawah rata-rata	Sub Sektor Berkembang Informasi dan Komunikasi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sub Sektor Terbelakang Pertambangan dan Penggalian Pengadaan Listrik dan Gas Jasa Lainnya

Sumber: Data Olahan, 2021

Kabupaten Sekadau memiliki lima sektor prima atau kuadran I, yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor *real estate*, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana sektor ini adalah sektor dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Sekadau lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan sektor yang berada pada sektor potensial ada enam, artinya sektor dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, sedangkan sektor berkembang ada dua, artinya bahwa sektor dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan juga rata-rata PRDB perkapita lebih tinggi daripada rata-rata PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan yang terakhir merupakan sektor terbelakang ada empat, artinya sektor ini dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita lebih rendah dari pada Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 10. Hasil Indeks Location Question (LQ) Kabupaten Sekadau

No	Lapangan Usaha	LQ							Keterangan (> 1) = Potensial
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	Rata-rata	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.66	1.64	1.65	1.66	1.68	1.68	1.662	Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	0.49	0.61	0.64	0.68	0.68	0.79	0.648	Tidak Potensial
3	Industri Pengolahan	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.34	0.347	Tidak Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.28	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.303	Tidak Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.65	0.67	0.65	0.59	0.53	0.54	0.604	Tidak Potensial
6	Konstruksi	1.08	1.15	1.09	1.05	1.03	0.99	1.064	Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.92	0.93	0.94	0.94	0.95	0.94	0.936	Tidak Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	0.42	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.363	Tidak Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.29	1.17	1.17	1.19	1.19	1.18	1.199	Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1.00	1.01	1.00	1.01	1.07	1.09	1.030	Potensial
11	Jasa Keuangan	0.59	0.58	0.56	0.55	0.53	0.49	0.550	Tidak Potensial
12	ReaEstate	1.43	1.45	1.44	1.44	1.42	1.40	1.432	Potensial
13	Jasa Perusahaan	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.113	Tidak Potensial
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.17	1.18	1.18	1.18	1.17	1.18	1.175	Potensial
15	Jasa Pendidikan	0.90	0.88	0.89	0.90	0.90	0.90	0.895	Tidak Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	1.12	1.16	1.18	1.19	1.20	1.137	Potensial
17	Jasa Lainnya	0.76	0.73	0.76	0.77	0.79	0.79	0.765	Tidak Potensial

Sumber: Data Olahan, 2021

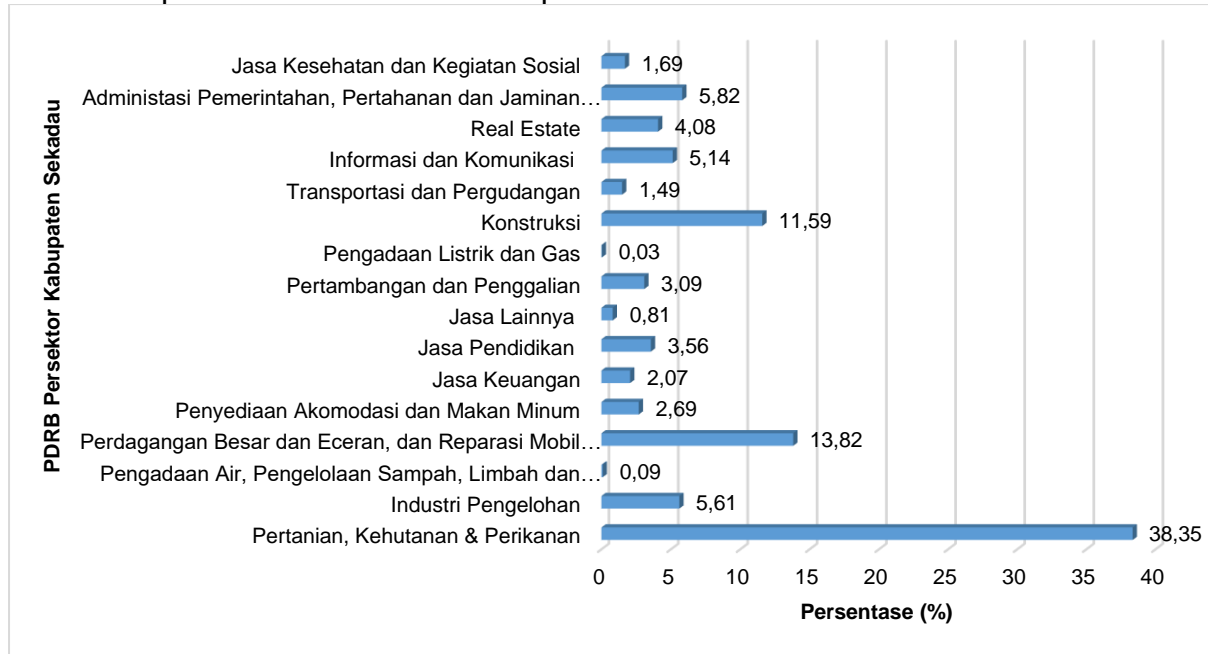
Sekadau memiliki tujuh sektor basis atau sektor potensial, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan

sosial, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor *real*

estate, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi, dan yang terakhir adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan untuk sisanya berada pada sektor tidak potensial yakni sebesar sepuluh sektor.

Angkatan kerja di Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 cukup

besar yakni sebesar 77,53%, dengan pengangguran sebesar 3,39% dan penduduk yang bekerja sebesar 96,61%. Lapangan kerja yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, perdagangan, jasa dan lainnya, dimana pada tahun tersebut sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 67,4%.



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 3. Rata-rata Kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2020

Rata-rata kontribusi terbesar pada tahun 2015-2020 terhadap PDRB Kabupaten Sekadau adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni sebesar 38,35%, sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil terhadap PDRB Sekadau adalah sektor pengadaan listrik, dan gas yakni sebesar 0,03%. Jika melihat jumlah penduduk Sekadau pada tahun 2020 yakni sebesar 211.559 jiwa dengan 101.809 jiwa perempuan dan 109.750 jiwa laki-laki. Angkatan kerja

Kabupaten Sekadau masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SD ke bawah, yakni 59.191 jiwa yang bekerja dengan pendidikan \leq Sekolah Dasar (SD), 23.678 jiwa yang bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 24.666 jiwa yang bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 4.994 jiwa yang bekerja dengan pendidikan Perguruan Tinggi (PT).

Tabel 11. Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kontribusi Laju Pertumbuhan	Kontribusi Kabupaten Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi ($y_{ik} > y_i$)	Kontribusi Kabupaten Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi ($y_{ik} < y_i$)
1	Pertumbuhan Ekonomi di atas rata-rata	Sub Sektor Prima Konstruksi	Sub Sektor Potensial Industri Pengolahan Transportasi dan Pergudangan Informasi dan Komunikasi Jasa Pendidikan
2	Pertumbuhan Ekonomi di bawah rata-rata	Sub Sektor Berkembang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sub Sektor Terbelakang Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum <i>Real Estate</i> Jasa Keuangan Jasa Lainnya

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada tabel di atas, menerangkan bahwa sektor yang berada di sektor prima, atau kuadran I, yakni sektor dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB perkapita Kapuas Hulu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Sektor yang berada di kuadran II adalah sektor dengan pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu lebih tinggi dari Kalimantan Barat dan kontribusi atau PDRB per kapita lebih kecil dari pada Kalimantan Barat, yang disebut sebagai sektor potensial, dimana sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, sektor jasa pendidikan, sektor informasi dan komunikasi dan sektor transportasi dan pergudangan.

Sedangkan sektor yang berada di kuadran III, merupakan sektor dengan pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu lebih kecil daripada Kalimantan Barat dan kontribusi atau PDRB perkapita Kapuas Hulu lebih besar daripada Kalimantan Barat atau

disebut dengan sektor berkembang, dimana sektor yang berkembang adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, sektor jasa perusahaan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian.

Untuk sektor terbelakang atau kuadran IV, sektor dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Kapuas Hulu lebih kecil daripada Provinsi Kalimantan Barat. Sektor terbelakang ini adalah sektor jasa keuangan, sektor *real estate*, sektor jasa lainnya, sektor pengadaan listrik, gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, serta yang terakhir adalah penyediaan akomodasi dan makan minum.

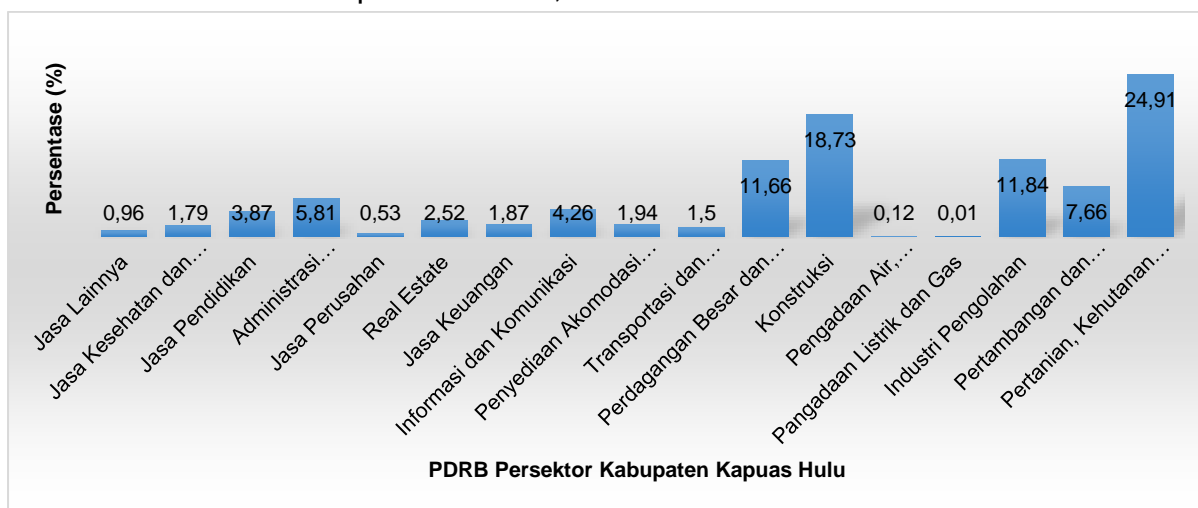
Tabel 12. Hasil Indeks *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Kapuas Hulu

No	Lapangan Usaha	LQ							Keterangan (> 1) = Potensial
		2020	2019	2018	2017	2016	2015	Rata-rata	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.07	1.07	1.06	1.08	1.10	1.10	1.08	Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	1.26	1.53	1.59	1.70	1.64	1.88	1.60	Potensial
3	Industri Pengolahan	0.76	0.74	0.74	0.73	0.71	0.71	0.73	Tidak Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	Tidak Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.80	0.82	0.82	0.86	0.86	0.86	0.84	Tidak Potensial
6	Konstruksi	1.77	1.76	1.75	1.70	1.70	1.62	1.72	Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	Tidak Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	0.41	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.37	Tidak Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.89	0.85	0.85	0.87	0.86	0.86	0.86	Tidak Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	0.88	0.89	0.86	0.83	0.82	0.83	0.85	Tidak Potensial
11	Jasa Keuangan	0.49	0.51	0.48	0.49	0.50	0.52	0.50	Tidak Potensial
12	<i>Real Estate</i>	0.87	0.89	0.88	0.89	0.89	0.89	0.88	Tidak Potensial
13	Jasa Perusahaan	1.16	1.15	1.15	1.14	1.13	1.13	1.14	Potensial
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.19	1.19	1.17	1.16	1.16	1.17	1.17	Potensial
15	Jasa Pendidikan	1.01	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	Tidak Potensial
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.04	1.23	1.23	1.24	1.25	1.24	1.20	Potensial
17	Jasa Lainnya	0.89	0.92	0.92	0.92	0.91	0.92	0.91	Tidak Potensial

Sumber: Data Olahan, 2021

Enam sektor pada tabel di atas yang dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor potensial Kabupaten Kapuas Hulu, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor administrasi pemerintahan,

pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian sedangkan sisanya yakni sebesar sebelas sektor merupakan sektor yang tidak potensial di Kapuas Hulu.



Sumber: DataOlahan, 2021

Gambar 3. Rata-rata Kontribusi sektor terhadap PDRBKabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015-2020

Kontribusi terbesar pada tahun 2015-2020 terhadap PDRB Kapuas Hulu adalah sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian, yakni sebesar 24,91%, selanjutnya sektor

konstruksi yakni sebesar 18,73%, dan sektor dengan kontribusi terkecil terhadap PDRB Kapuas Hulu adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

sebesar 0,12%, dan yang terakhir adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,01%.

Penyerapan tenaga kerja di Kapuas Hulu tahun 2020 terbesar adalah sektor pertanian, yakni sebesar 74.150 pekerja atau sebesar 52,68%, sektor industri pengolahan dengan penyerapan tenaga kerja sebesar

28.272 pekerja dan sektor jasa, yakni sebesar 38.331 pekerja, pekerja ini didominasi oleh pekerja dengan umur 15-19 tahun dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 140.753 pekerja dan dengan pengangguran terbuka sebesar 5.901 jiwa, Kabupaten Kapuas Hulu dengan persentase penduduk miskin 8,99%.

Tabel 13. Hasil Tipologi Klassen Kabupaten Sintang

No	Kontribusi Laju Pertumbuhan	Kontribusi Kabupaten Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi (yik > yi)	Kontribusi Kabupaten Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi (yik < yi)
1	Pertumbuhan Ekonomi di atas rata-rata	Sub Sektor Prima Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Pendidikan	Sub Sektor Potensial Transportasi dan Pergudangan <i>Real Estate</i> Jasa Keuangan
2	Pertumbuhan Ekonomi di bawah rata-rata	Sub Sektor Berkembang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sub Sektor Terbelakang Industri Pengolahan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Jasa Lainnya

Sumber: Data Olahan, 2021

Sektor yang berada di kuadran I atau sektor dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kabupaten Sintang lebih tinggi daripada Kalimantan Barat atau yang disebut dengan sektor prima adalah sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor informasi dan komunikasi.

Sektor yang berada di kuadran II adalah sektor dengan pertumbuhan ekonomi Sintang lebih tinggi dari

Kalimantan Barat dan kontribusi atau PDRB perkapita lebih kecil daripada Kalimantan Barat atau yang disebut dengan sektor potensial. Sektor yang berada di kuadran II adalah sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan yang terakhir adalah sektor *real estate*.

Sedangkan sektor yang berada di Kuadran III, artinya sektor dengan pertumbuhan ekonomi Sintang lebih kecil dari pada Kalimantan Barat dan kontribusi atau PDRB perkapita Sintang lebih besar daripada Kalimantan Barat atau disebut dengan

sektor berkembang adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian dan yang terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor yang berada di sektor IV adalah sektor dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kabupaten Sintang lebih kecil dari

pada Kalimantan Barat, sektor ini biasa disebut dengan sektor terbelakang, yakni sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan yang terakhir sektor jasa lainnya.

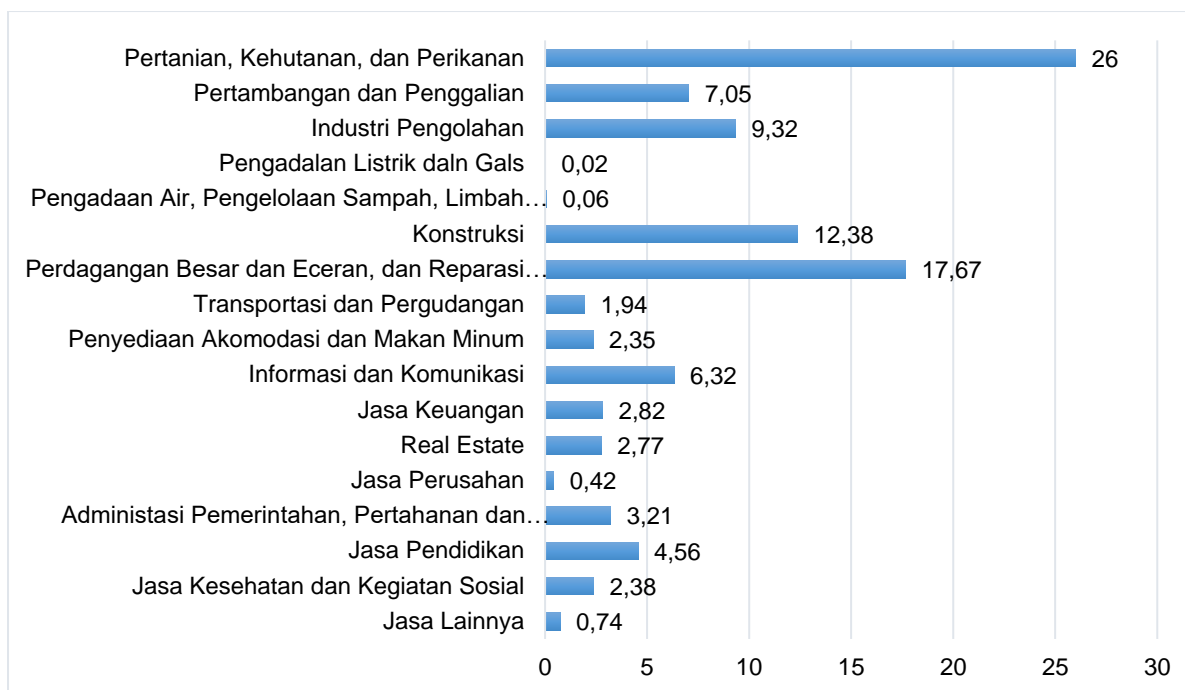
Tabel 14. Hasil Indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten Sintang

No	Lapangan Usaha	LQ						Rata-rata	> 1 = Potensial
		2020	2019	2018	2017	2016	2015		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,12	1,10	1,09	1,11	1,16	1,18	1,13	Potensial
2	Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,41	1,46	1,54	1,48	1,71	1,47	Potensial
3	Industri Pengolahan	0,57	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,58	Tidak Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	Tidak Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44	0,43	Tidak Potensial
6	Konstruksi	1,19	1,23	1,18	1,13	1,09	1,00	1,14	Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,19	1,20	1,21	1,21	1,20	1,18	1,20	Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	0,53	0,47	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	Tidak Potensial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	1,04	1,03	1,06	1,04	1,03	1,04	Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1,28	1,28	1,28	1,22	1,26	1,25	1,26	Potensial
11	Jasa Keuangan	0,77	0,77	0,77	0,76	0,73	0,70	0,75	Tidak Potensial
12	Jasa Perusahaan	0,90	0,90	0,91	0,92	0,90	0,90	0,90	Tidak Potensial
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,66	0,65	Tidak Potensial
14	Jasa Pendidikan	1,16	1,14	1,15	1,16	1,15	1,14	1,15	Potensial
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,56	1,57	1,58	1,61	1,61	1,61	1,59	Potensial
16	Jasa Lainnya	0,66	0,68	0,70	0,71	0,71	0,72	0,70	Tidak Potensial

Sumber: Data Olahan, 2021

Delapan sektor pada tabel di atas yang dikategorikan sebagai sektor basis atau sektor potensial pada Kabupaten Sintang, yakni sektor pada jasa kesehatan, sektor kegiatan sosial, sektor jasa pendidikan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda

motor, sektor konstruksi, sektor pertambangan dan yang terakhir adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan sisanya yakni sembilan sektor lainnya merupakan sektor *non* basis atau sektor yang tidak potensial di Kabupaten Sintang. Untuk sektor *real estate* di Sintang tidak ada.



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 4. Rata-rata Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Sintang Tahun 2015-2020

Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sintang pada tahun 2015-2020 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni sebesar 26%, disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, yakni sebesar 17,67%. Sedangkan kontribusi terendah terhadap PDRB di Kabupaten Sintang adalah, sektor pengadaan listrik dan gas, yakni sebesar 0,02% dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

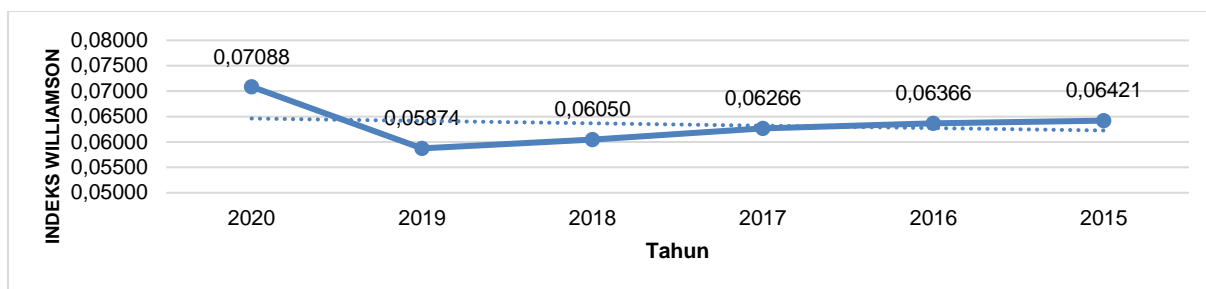
Pada tahun 2020 penduduk Sintang yang bekerja sebesar 222.933 pekerja dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 222.933 jiwa, pekerja di Kabupaten Sintang memiliki pendidikan SD ke bawah sebanyak 124.111 jiwa, SMP sebesar 33.722 jiwa, SMA sebesar 46.307 jiwa dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 18.793 jiwa, sedangkan pengangguran

terbesar dengan pendidikan SD ke bawah yakni sebesar 3.269 jiwa, SMA sebesar 3.106 jiwa, perguruan tinggi sebesar 2.282 jiwa dan SMP sebesar 1.855 jiwa.

Masyarakat Kabupaten Sintang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perburuan dan perikanan, dimana pada tahun 2020 yakni sebesar 142.977 pekerja dan perdagangan, rumah makan, dan akomodasi yakni sebesar 26.625 pekerja, sedangkan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor listrik gas dan air minum, yakni sebesar 302 pekerja dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar 2.987 pekerja.

Ketimpangan Daerah

Adapun hasil dari uji ketimpangan daerah yang ingin dijadikan provinsi baru adalah sebagai berikut:



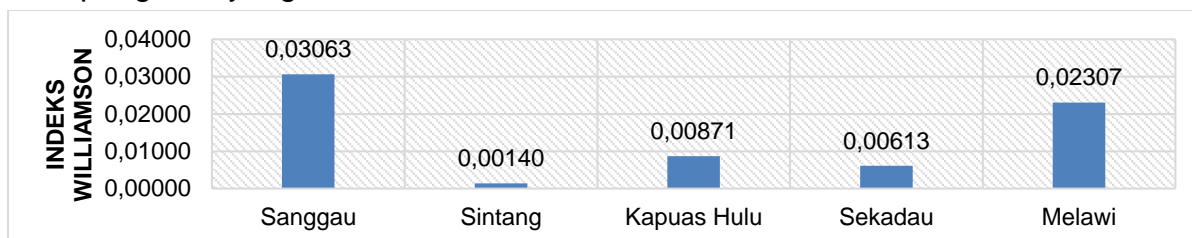
Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 5. Rata-rata Nilai Indeks Williamson di Lima Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2015-2020

Hasil Indeks Williamson

Nilai Indeks Williamson lima kabupaten di Kalimantan Barat atau daerah yang akan diusulkan menjadi bagian provinsi baru yakni, Kapuas Raya dikatakan masih rendah, yakni nilainya di bawah nilai 0,10 atau mendekati angka nol, dimana hasil Indeks Williamson yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Hasil

Indeks Williamson pada tahun 2015-2020 di atas menunjukkan bahwa nilai tren Indeks Williamson selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 sebesar 0,064 menjadi 0,070 pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya hasil nilai Indeks Williamson di lima kabupaten yang akan diusulkan menjadi provinsi baru sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 5. Indeks Williamson Lima Kabupaten Tahun 2015-2020

Nilai Indeks Williamson lima kabupaten tersebut berada di bawah 0,04, rata-rata mendekati nol. Daerah dengan nilai Indeks Williamson terendah adalah Kabupaten Sintang, yakni sebesar 0,00140, disusul oleh Sekadau sebesar 0,00613 dan nilai Indeks Williamson tertinggi adalah Kabupaten Sanggau yakni sebesar 0,03063. Tetapi, sebagian besar dari lima kabupaten yang akan dijadikan bagian Provinsi Kapuas Raya pada tahun 2015-2020 memiliki nilai Indeks Williamson yang jauh dari angka 1 atau lebih mendekati nilai nol, yang artinya bahwa ketimpangan di lima kabupaten tersebut sangat rendah.

Kelayakan Pemekaran Kapuas Raya

Dari hasil perhitungan jumlah antara indikator kelayakan dengan skor, maka ke lima daerah tersebut tidak layak untuk dimekarkan karena dari nilai indikator kelayakan daerah tersebut berada di antara 170 sampai dengan 200 nilai totalnya, karena masih berada di bawah standar minimal kelayakan pemekaran daerah yakni sebesar 250 ke atas dari total keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebuah daerah jika kondisi ekonominya sudah memadai, maka tentunya akan meningkatkan pembangunan manusia (Simbolon & Kaimaintan, 2019). Jika melihat ke tiga

indikator tersebut dari ke lima daerah provinsi baru adalah sangat rendah yang dicanangkan untuk menjadi

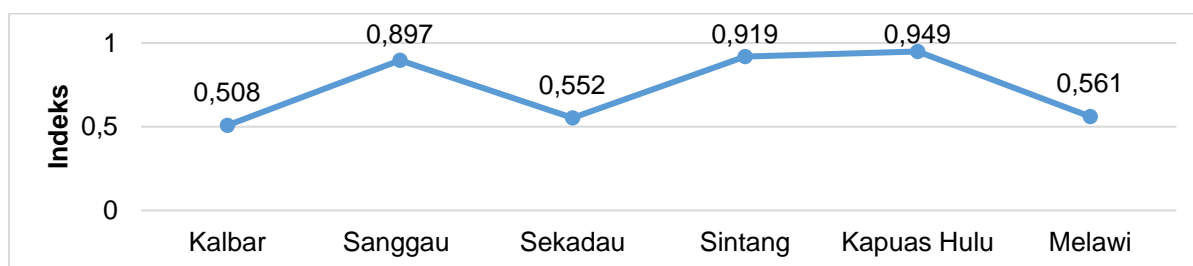
Tabel 15. Kelayakan Pemekaran

No	Daerah	Keuangan Daerah (40)			Pertumbuhan Ekonomi (30)			Indeks Pembangunan Manusia (30)			Total	Kelayakan Pemekaran
		Index	Skor	Nilai	%	Skor	Nilai	Index	Skor	Nilai		
1	Ka-Bar	0,508	2	80	4,79	2	60	67,90	2	60	200	Tidak Layak
2	Sanggau	0,897	2	80	4,19	2	60	66,20	2	60	200	Tidak Layak
3	Sekadau	0,552	2	80	4,31	2	60	64,93	1	30	170	Tidak Layak
4	Sintang	0,919	2	80	3,80	2	60	66,93	2	60	200	Tidak Layak
5	Kapuas Hulu	0,949	2	80	4,43	2	60	65,75	2	60	200	Tidak Layak
6	Melawi	0,561	2	80	4,45	2	60	65,87	2	60	200	Tidak Layak

Sumber: Data Olahan, 2021

Ada beberapa penyebab pemekaran suatu daerah, diantaranya adalah persoalan performa, ekonomi dan politik, aspek performa atau yang biasanya juga disebut sebagai pelayanan publik juga menjadi perhatian karena jangkauan pelayanan publik ke pemerintah pusat. Daerah yang luas dan besar tentunya menyulitkan akses terhadap pelayanan publik, aspek ekonomi biasanya terjadi ketika daerah yang

luas tetapi beberapa daerah tidak mendapatkan pembangunan dari pemerintah pusat, atau juga karena faktor alokasi keuangan otonomi daerah seperti DBH, DAK, dan DAU, yang ketiga adalah aspek politis, dimana beberapa tokoh politik sering memanfaatkan ini untuk mendapatkan jabatan politik, baik di daerah maupun anggota DPRD di daerah pemekaran (Sjafrizal, 2018).



Sumber: Data Olahan, 2021

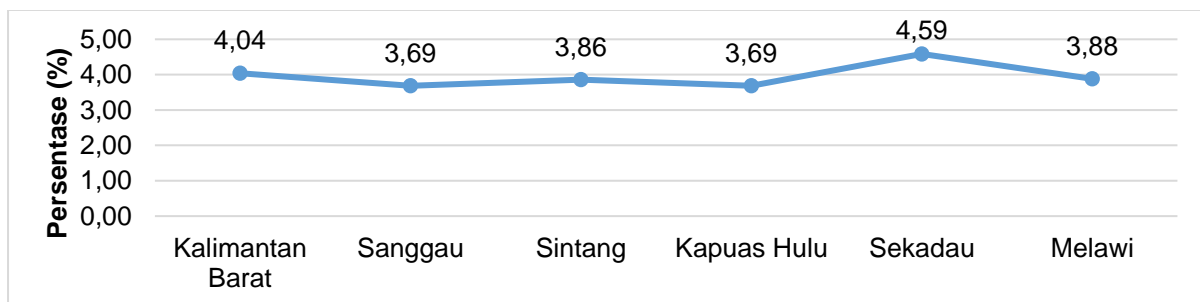
Gambar 7. Indeks Kemampuan Fiskal Kalimantan Barat dan Lima Kabupaten

Jika dilihat dari indeks kemampuan fiskal lima daerah tersebut memiliki nilai lebih tertinggi daripada Kalimantan Barat. Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) (Kementerian Keuangan, 2021), Indeks Kemampuan Daerah (IKD) merupakan salah satu indikator kemampuan keuangan daerah yang digunakan dalam tahun tertentu. Indikator yang terpenting adalah kemampuan keuangan daerah menjadi faktor yang utama dalam hal membiayai belanja daerahnya baik dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Wahab et al.,

2015). Karena dengan aspek pengelolaan keuangan daerah akan memberikan akses yang luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sekaligus menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan (Vurry et al., 2018). Ketidakmampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada maka akan menyebabkan kerugian atas berlakunya otonomi daerah tersebut, tetapi bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar malah akan menguntungkan daerahnya sendiri atas berlakunya desentralisasi fiskal ini (Wurangian et al., 2017). Tentunya

tidak hanya karena faktor finansial yang berpotensi suatu daerah dimekarkan, tetapi ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor politis dan faktor yang lain. Desentralisasi fiskal tidak dapat menjelaskan sebagai pendorong percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemekaran (Suwanda, 2020). Selain itu juga desentralisasi fiskal memberikan dampak terhadap pelayanan publik pada suatu daerah (Sow & Razafimahefa, 2015). Bahwa aspek kelayakan pemekaran daerah yakni terkait aspek kemampuan keuangan daerah, dimana rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal > 1, gunanya menjaga kemampuan daerah otonomi baru (Sjafrizal, 2018). Desentralisasi pendapatan daerah memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap perkembangan beberapa negara baik berkembang ataupun negara maju (Sow & Razafimahefa, 2015).

Aspek ekonomi juga menjadi hal penting dalam melihat sebuah pemekaran suatu daerah. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dengan potensi perekonomian yang ada dan aspek pendapatan daerah dalam pembangunan daerah tersebut kedepan. Dalam pembangunan daerah yang terpenting adalah membangun kerjasama kemitraan bisnis sehingga kemitraan ini pada gilirannya akan mendukung kondisi perekonomian daerah atau suatu negara, tetapi juga negara harus memberikan jaminan yang luas terhadap akses bisnis yang lancar tanpa hambatan (Sadyrtinov & Rodnyansk, 2015). Selain itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan peningkatan digitalisasi (Serkova, 2022).



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 7. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2015-2021

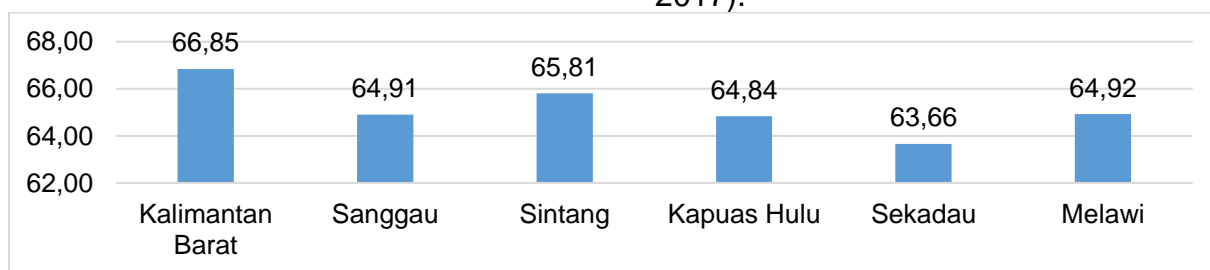
Pertumbuhan ekonomi di lima kabupaten yang menjadi daerah yang akan dimekarkan menjadi Kapuas Raya memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah (<5%), begitu juga Kalimantan Barat, hanya Kabupaten Sekadau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari kabupaten lainnya selama 7 tahun terakhir, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Sekadau sebesar 4,5%. Jika melihat aspek penting dalam pemekaran adalah pertumbuhan

ekonomi, kriteria ini menjadi aspek yang tidak bisa mendukung proses pemekaran daerah. Standar minimal kelayakan sebuah daerah jika dilihat dari sosial ekonomi minimal memiliki pertumbuhan ekonomi > 5%, agar ketika pemekaran suatu daerah tidak menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah baru (Sjafrizal, 2018). Aspek ekonomi menjadi hal yang begitu penting dalam pemekaran suatu daerah karena dengan pertumbuhan ekonomi dan

percepatan pembangunan ekonomi juga menjadi faktor kemandirian sebuah daerah setelah dimekarkan (Winarsi et al., 2020). Pemekaran wilayah tujuannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga ketika sebuah daerah dimekarkan kesejahteraan masyarakat tercapai (Murtala et al., 2020). Pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan (Supartoyo et al., 2014). Karena tingkat produktivitas antar daerah akan membuat derajat yang cukup besar atas pelebaran kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah (Shindo, 2015). Padahal idealnya, dalam perspektif pemerintah pusat, kebijakan pemekaran daerah menjadi solusi yang baik untuk mendorong kegiatan ekonomi dan mempercepat pembangunan ekonomi di sekitar wilayah perbatasan negara. Tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, ada dua aspek lain yang mungkin ditingkatkan, seperti: 1) Identitas nasional, dan 2) Mekanisme pertahanan wilayah

perbatasan nasional (Poerwati & Imduddina, 2019).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Cina menekankan pada konservasi energi dan lingkungan dimana semua tujuannya adalah penekanan pada pertumbuhan PDRB pemerintah daerah (Chen, 2015). Pembangunan daerah yang memadai yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Goschin, 2015). Sektor pertambangan memiliki kontribusi yang jelas dan besar terhadap pembangunan di daerah baik ekonomi, sosial budaya, kesehatan, politik dan lingkungan (Horsley et al., 2015). Ketimpangan daerah dalam proses pembangunan di suatu negara dapat berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh, oleh sebab itu pengentasan ketimpangan diperlukan dengan cara kebijakan ekonomi yang tepat dan diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap faktor penghambat pertumbuhan ekonomi (Novkovska, 2017).



Sumber: Data Olahan, 2021

Gambar 6. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia 2015-2021

Kelayakan sebuah pemekaran daerah juga dilihat dari aspek kualitas sumber daya manusia yang bisa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kalimantan Barat selama tujuh tahun terakhir memiliki rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia relatif rendah, yakni 66,86 < 70. Artinya bahwa jika kualitas pembangunan manusia memadai tidak

akan mengganggu proses pemekaran suatu daerah tetapi sebaiknya jika pembangunan manusia di daerah tersebut tidak memadai, akan mengganggu proses pemerintahan dan pelayanan publik pada daerah yang bersangkutan, bahkan SDM yang rendah menyulitkan daerah tersebut untuk berkembang. Daerah yang memadai jika Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) > 70, artinya bahwa daerah tersebut adalah daerah dengan kualitas sumber daya yang memadai atau relatif baik, tetapi jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) < 70, maka kualitas sumber daya manusianya relatif rendah (Sjafrizal, 2018).

Pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang ada disekitar daerah tersebut. Kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan daerah salah satunya adalah dengan, 1) meningkatkan inovasi daerah melalui kegiatan penelitian; 2) mempromosikan perusahaan, pengembangan dan pertumbuhan bisnis; 3) berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan daerah; 4) meningkatkan kesetaraan sosial melalui regenerasi dan pengembangan (Albulescu & Albulescu, 2014). Kurangnya kapasitas dari pemerintah lokal mengatur struktur pemerintah dalam pembangunan ekonomi menjadi penghambat pencapaian pembangunan ekonomi yang lebih positif (Chapple & Montero, 2016). Dalam penelitiannya, Luca, (2016) menemukan bahwa Turki adalah Negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh sumber daya manusia yang memadai. Karena dengan tingginya pembangunan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, besarnya PDRB tanpa pembangunan manusia tidak akan berarti apa-apa pertumbuhan tersebut (Ansyar et al., 2021). Rendahnya pembangunan manusia mengakibatkan produktivitas kerja penduduk rendah, sedangkan tujuan utama dalam pembangunan manusia adalah untuk pembangunan berkelanjutan (Miranti et al., 2020).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Melawi hanya memiliki lima sektor prima, yakni dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB perkapita lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan lainnya berada pada sektor potensial, berkembang dan terbelakang. Begitu juga dengan Sekadau dan Sintang hanya lima sektor yang masuk ketegori prima, Kapuas Hulu hanya satu sektor, yakni sektor konstruksi yang masuk pada sektor prima. Sedangkan untuk Kabupaten Sanggau tidak memiliki sektor prima.

Hasil pengujian LQ didapat bahwa di Kabupaten Sanggau memiliki empat sektor basis atau sektor potensial, Melawi memiliki sepuluh sektor basis, Kabupaten Sekadau ada tujuh sektor basis atau potensial. Kapuas Hulu memiliki enam sektor basis atau potensial. Sedangkan untuk Kabupaten Sintang delapan sektor basis.

Hasil Indeks Williamson menunjukkan bahwa lima daerah yang diusulkan menjadi bagian dari Kapuas Raya memiliki nilai rendah, yakni rata-rata pada tahun 2015-2020 nilai Indeks Williamson sebesar 0,064 pada tahun 2015 dan 0,070 pada tahun 2020. Sedangkan dari ke lima kabupaten tersebut juga memiliki nilai Indeks Williamson sangat rendah, paling rendah adalah Kabupaten Sintang yakni sebesar 0,00140 disusul oleh Sekadau yakni sebesar 0,00613. Artinya bahwa ketimpangan di lima daerah tersebut rendah.

Sedangkan dari hasil perhitungan uji kelayakan pemekaran daerah, Kalimantan Barat dan lima daerah yang ingin dijadikan bagian dari

provinsi persiapan Kapuas Raya tidak memiliki nilai yang layak untuk dimekarkan, karena hasil dari tiga indikator yang dijadikan acuan pemekaran sebuah daerah memiliki nilai yang rendah, seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator indeks keuangan daerah. Artinya ketiga kategori tersebut di bawah kriteria daerah yang bisa dimekarkan.

REKOMENDASI

Dari hasil penelitian di atas, dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ke lima daerah yang dipersiapkan sebagai Provinsi Kapuas Raya agar layak dimekarkan maka pemerintah provinsi dan kelima kabupaten tersebut harus meningkatkan pendapatannya terutama sektor yang potensial dan berkembang sehingga sektor tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan keuangan daerah. Selain itu, juga perlu perbaikan pembangunan manusia, baik segi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan perkapita masyarakat di lima daerah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat yang telah menyediakan data dan kepada Jurnal Borneo Akcaya yang telah menerbitkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Albulescu, I., & Albulescu, M. (2014). The University in the Community. The University's Contribution to Local and Regional Development by Providing Educational Services for Adults. *Procedia - Social and*

Behavioral Sciences, 142, 5–11. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.578>

Ansyar, M. H., Padjung, R., & Salam, M. (2021). Analysis of the human development index to the development of the province of west Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 921(1), 31–38. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/921/1/012041>

Arsyad. (2016). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Pertama*. BPFE-Yogyakarta.

Chapple, K., & Montero, S. (2016). From learning to fragile governance: Regional economic development in rural Peru. *Journal of Rural Studies*, 44, 143–152. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.01.009>

Chen, S. (2015). China Economic Review Environmental pollution emissions , regional productivity growth and ecological economic development in China (a) Waste Water Emission (b) Waste Gas Emission. *China Economic Review*, 35(2015), 171–182. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2014.08.005>

Fortunika, S. O., Istiyanti, E., & Sriyadi. (2017). Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah (Analisis Struktur Input–Output). *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/agr.3252>

Goschin, Z. (2015). Regional Divergence in Romania Based on a New Index of Economic and Social Development. *Procedia*

- Economics and Finance*, 32(15), 103–110.
[https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01370-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01370-2)
- Horsley, J., Prout, S., Tonts, M., & Ali, S. H. (2015). Sustainable livelihoods and indicators for regional development in mining economies. *Extractive Industries and Society*, 2(2), 368–380. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2014.12.001>
- Ismail, A. (2020). *Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Kalimantan Barat*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturam Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*. 1–25.
- Khoyanah, S., Bakce, D., & Yusri, J. (2015). The Role of Agricultural Sector to Economic of Kabupaten Rokan Hilir: Input - Output Structure Analysis. *Jom Faperta*, 18(2), 33–37.
- Luca, D. (2016). Votes and Regional Economic Growth: Evidence from Turkey. *World Development*, 78, 477–495. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.033>
- Marta, J. (2012). Faktor Pemicu dan Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah di Sumatra Barat. *Jurnal Ecosains*, 1(1), 61–76.
- Miranti, Cani, R., Guerra, M., & Carlos. (2020). Human Development Dynamics across Districts of Indonesia: A Study of Regional Convergence and Spatial Approach. *SSRN Electronic Journal*, 100479. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3596894>
- Murtala, M., Chalirafi, C., Putra, T., Gunawan, E., Amri, A., & Iskandar, I. (2020). *Region Expansion through Base Sector Expansion: An Evidence from Location Quotient Approach*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2018.2294101>
- Novkovska, B. (2017). Regional Development Disparities and their Connection with Hidden Economy. *UTMS Journal of Economics*, 8(2), 151–158.
- Peraturan Pemerintah RI. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. *Jdih Bpk RI*.
- PKA DPR RI. (2021). Budget Issue Brief Industri & Pembangunan. *Pusat Kajian Anggaran DPR RI*, 01(1).
- Poerwati, T., & Imaduddina, A. H. (2019). Keberhasilan Pembangunan Desa Ditinjau Dari Bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 3(02), 103–114. <https://doi.org/10.36040/pawon.v3i02.893>
- Sadyrtidinov, R., & Rodnyansk, D. (2015). Integration Processes as A Factor of Regional Development. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), 772–777. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00510-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00510-9)
- Serkova, A. (2022). *Infrastructure In The Context Of Regional Development In Russia*. 29–37. <https://doi.org/10.15405/epsbs.20>

22.03.4

- Shindo. (2015). The Effect of Education Subsidies on Regional Economic Growth and Disparities in China. *Economic Modelling*, 27(5), 1061-1068.
- Simbolon, N. E., & Kalimaintan, D. M. (2019). Pendidikan Berbasis Data: Sebuah Pendekatan Strategis Untuk Perbaikan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat. *Jurnal Borneo Akcaya*, 05(01), 44–51.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sow, M., & Razafimahefa, I. (2015). Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery. *IMF Working Papers*, 15(59), 1. <https://doi.org/10.5089/9781484351116.001>
- Supartoyo, Y. H., Tatuh, J., & Sendouw, R. H. E. (2014). The Economic Growth and the Regional Characteristics: The Case of Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 16(1), 3–18. <https://doi.org/10.21098/bemp.v16i1.435>
- Suratman, E., Effendi, C., Wahyudi, Jumadi, Radian, Fathurachman, T., Panggabean, M., Arsyad, M. I., Djojosoekarto, A., Suryaman, C., & Eveline, R. (2012). *Desain Penataan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2025*. <https://media.neliti.com/media/publications/45186-ID-desain-penataan-daerah-di-provinsi-kalimantan-barat-tahun-2012-2025.pdf>
- Suwanda, D. (2020). Decentralization of Fiscal Asymmetric for Community Well-Being: Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, 12(06), 2868–2881. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201249>
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Trend Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 128–135.
- Wahab, L. O. A., Rofingantun, S., & Kreuta, B. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerahh*, 2(3), 1–17.
- Winarsi, S., Prihatiningtyas, W., & Fitriana, Z. M. (2020). *Sustainable Regional Expansion Model in Order to Increase the Regional Potency: Case Study in Indonesia*. 179–186. <https://doi.org/10.5220/0010049201790186>
- Wurangian, S., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Tomohon (Studi Kasus Di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 64–78.